



## Raperda Perparkiran Masih Menggantung

UMBULHARJO (MERAPI)- Program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2018 DPRD Kota Yogyakarta bakal direvisi. Pasalnya tidak boleh lagi ada istilah raperda luncuran yakni sisa raperda tahun sebelumnya yang dibahas di tahun ini. Sejumlah raperda masih menggantung hingga kini, di antaranya raperda perparkiran.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menyebut mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota, satu raperda atau propemperda harus diselesaikan dalam tahun. Tidak boleh menyisakan raperda yang dibahas di tahun berikutnya atau raperda luncuran.

"Di dalam PP 12 amanatnya jelas 1 raperda atau propemperda tahun ini ya harus diselesaikan tahun ini juga. Dari konsultasi kami ke Biro Hukum DIY juga mengharap tidak ada lagi yang namanya raperda luncuran," kata Sujanarko, usai rapat paripurna, Senin (28/5).

Diakukunya, masih banyak raperda luncuran sisa tahun 2017 yang masuk dalam Propemperda 2018. Total ada 12 raperda luncuran dan 5 raperda di antaranya sudah diselesaikan di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) untuk menindaklanjuti di panitia khusus (pansus). Tapi masih ada 4 raperda yang masih menggantung pembahasannya belum selesai yakni tiga raperda perparkiran dan satu raperda terkait penyandang disabilitas.

"Kami sampaikan ke Biro Hukum DIY, tiga raperda perparkiran ini politis sekali yang mengganjal di kebijakan umum dan retribusi. Sedangkan yang disabilitas membongkar raperda dari awal, sehingga 4 raperda ini masih *nggandhul* (menggantung)," paparnya.

Dia menyatakan total ada 31 raperda dalam Propemperda 2018. Dengan PP 12 tahun 2018 maka kemungkinan raperda akan dikurangi. Terutama raperda baru yang akan dikurangi. Dewan juga akan menetapkan pembahasan raperda selesai dalam waktu beberapa bulan.

Secara terpisah Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti menyampaikan ada sekitar 7 raperda yang berhasil diselesaikan akhir bulan ini. Dari Propemperda tahun 2018 ada 14 raperda baru yang harus diselesaikan tahun ini dan sisanya adalah raperda luncuran. "Kalau yang luncuran tahun lalu itu kami anggap sebagai utang yang seharusnya bisa segera selesai," tandas Bambang. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005